



PENGARUH PENGANGGRAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KINERJA DI DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

Agung Bakti Wicaksana

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

e-mail: agungbakti266@gmail.com

Abstract

Performance Based Budgeting is a system for the preparation and management of regional budgets that are oriented towards achieving results or performance. The object of this research is the Ngompro Village Government Unit, Pangkur Sub-District, Ngawi District. The sample of this study was all staff of the Ngompro Village government staff using sampling techniques. This study aims to determine how high the level of Effectiveness of Performance Control With Performance-Based Budgeting Methods This study uses a simple regression analysis method with data management using the help of SPSS 23.0 for Windows applications. Based on research, it is known that the results of the test of the effect of Performance-Based Budgeting on the Effectiveness of Performance Control. Based on the results of partial tests that have been done between Performance Based Budgeting on Effectiveness of Performance Control as a variable shows that t count equals 9.27 with a significant value of $0.01 < 0.05$ and the results of multiple regression tests show a coefficient of 0.660 shows that Performance-Based Budgeting is influential positive for Effectiveness of Performance Control.

Keywords: Performance Based Budgeting, Effectiveness of Performance Control

ABSTRAK

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Objek penelitian ini adalah Satuan pemerintah Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Sampel penelitian ini adalah seluruh staf pegawai pemerintah Desa Ngompro dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat Efektivitas Pengendalian Kinerja Dengan Metode Penganggaran Berbasis Kinerja Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan pengelolaan data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23,0 for windows. Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa hasil uji pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja sebagai variabel menunjukkan bahwa t hitung sebesar 9,273 Dengan nilai signifikan sebesar $0,01 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,660 menunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja.

Kata kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja, Efektivitas Pengendalian Kinerja

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah atau desentralisasi. secara teori otonomi daerah dan desentralisasi dalam praktiknya keduanya sukar di pisahkan. Pada umumnya desentralisasi yang membahas tentang bagian wewenangan kepada penyelenggaraan negara, Dan otonomi daerah itu meliputi hak yang mengikuti. Otonomi daerah sendiri juga

bisa diartikan sebagai kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang No32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah otonom supaya mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain berdasarkan aturan hukum pelaksanaan otonomi daerah serta tuntunan globalisasi untuk wajib di berdayakan dengan langkah memberikan wewenang daerah yang nyata, lebih luas dan tanggung jawab umumnya untuk mengatur serta menggali potensi di daerahnya masing-masing

Otonomi ini merupakan kebijakan yang mendasari negara untuk penyelenggaraan organisasi pemerintah daerah yang artinya, semua kegiatan dan kebijakan pemerintah serta kegiatan kebijakan pembangunan di daerah dilakukan menurut arah dan di tetapkan didalam kebijakan negara.

Kunci penting dalam menjunjung pelaksanaan pembangunan adalah dengan cara pengelola keuangan didalam pembangunan di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Namun hal ini masih sering ada masalah yang bisa menghambat lajunya suatu pembangunan, seperti yang sudah kita ketahui hambatan justru malah sering dialami daerah, apalagi daerah yang kurang potensialnya, baik dilihat dari sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Sumber daya yang meningkat harus dapat di manfaktkn dengan baik, seiring berjalanya waktu sumber daya tersebut telah mengikat. Dan sisa belanja yang bisa diolah kembali di sebut *fiscal space* APBN yang terbatas tersebut belanja negara akan lebih sulit di kelola oleh pemerintah.

Untuk mencapai keefektifan kinerja manajerial dibutuhkan untuk menyumbangkan ide dalam menyusun anggaran dari peningkatan kinerja manajerial agar mencapai komunikasi sehingga bawahan bisa memilih, untuk memilih itupun tanggung jawab yang besar dalam individu karena berlibatnya dirinya untuk menyusun anggaran.

Dampak pemberian subsidi dan pembiayaan proyek daerah bisa mengakibatkan krisis ekonomi. hal ini dapat menghambat keuangan. Maka dari itu setiap daerah diwajibkan harus mampu menggali sumberdayanya serta mampu membiyayai anggaran di wilayahnya.

Undang-Uudang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membawa konsekuensi bagi daerah didalam suatu bentuk tanggung jawab atas alokasi dana di miliki dengan suatu cara yang efektif dan efisien.pada konsep dasar penganggaran kinerja pemerintah perlu melakukan pengelolaan dalam publik yang di dasarkan pada anggran kinerja.

Korupsi kolusi serta nepotisme mengakibatkan dampak krisis di segala bidang hal ini merupakan salah satu fenomena pembangunan yang berkembang saat ini; dalam mewujudkan *godgoverance* dengan adanya tiga pilar yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, hal itu supaya pemerintah daerah

mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya, Bagian dari *good goverance*. Adapun tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat efektifitas pengendalian kinerja dengan metode penganggaran berbasis kinerja

Bagian dari *good goverance* adalah suatu Proses penyelenggaraan kekuasaan Negara didalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Untuk terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya dari *good goverance* di tunjukan melalui tranparasi, akuntabilitas dan partisipasi, suatu intansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan ke gagalannya pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan maka dari itu penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat,nyata dan jelas sangat di perlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pengertian anggaran sektor publik

Merupakan sebuah estimasi kinerja yang akan dicapai dan diukur ukuran finansial (Mardiasmo 2009). Anggaran pernyataan perkiraan penerimaan serta pengeluaran yang di harapkan terjadi dalam suatu atau beberapa periode yang akan datang (Bastian 2006). Dengan sesuai perkembangannya administrasi sistim publik dalam sistem sosial serta politik tertentu berkembang sistem penganggran negara yang dapat di sebut juga penganggaran sektor publik.

Anggaran dalam sektor publik yang juga di sebut anggran publik yang lebih merujuk pada anggaran pemerintah. Anggaran publik ini berisis suatu kegiatan xdi presentasikan dalam suatu bentuk pendapatan, serta belanja dalam moneter.(Mardiasmo 2009).(Halim dan Kusufi 2012) Anggaran menjadi informasi yang sangat penting dalam sebuah organisasi sektor publik dan merupakan sebuah bagian utama dari akuntansi pemerintah. Anggaran dalam akuntansi sektor publik tidak hanya masuk dalam bidang akuntansi manajemen melainkan juga akuntansi keuangan dengan adanya laporan realisasi anggaran (LRA).

Pengertian penganggaran berbasis kinerja

Peraturan pemeritah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah, di Indonesia saat ini penganggaran di susun sama pendekatan Pendekatan kinerja ini disusun oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencaaian tujuan dan sasaan pelayanan publik.

Menurut Darise (2010) penganggaran berbasis kinerja adalah suatu anggaran pendekatan kinerja dengan sistem anggaran yang mengutamakan suatu upaya pencapaian untuk hasil dengan keluaran dari rencana biaya alokasi yang

sudah di tetapkan. Anggaran kerja yang efektif lebih anggaran program atau organisasi dengan keluaran yang telah antisipasi.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja

Di dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, suatu organisasi tidak hanya diwajibkan untuk atau fungsi dasar atau program program kegiatan dan jenis-jenis belanja saja tetapi harus juga harus menetapkan di capai. Didalam kinerja tersebut antarlain adalah bentuk keluaran dari kegiatan yang akan di laksanakan dan hasil keluaran dari program yang sudah di tetapkan. Apabila telah di tetapkan maka kinerja yang akan di capai kemudian baru di hitung pendanaan yang akan di butuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang di targetkan sesuai rencana kinerja.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Manfaat tersebut di deskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang di tuangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja

Muljarijadi(2006) menyatakan berapa manfaat bisa di rasakan adanya ukuran kerja (1) akuntabilitas organisasi publikasi lebih mudah di lihat; (2) peningkatan pelayanan pada publik; (3) peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Jika terjadi suatu hal perbedaan antara rencana-rencana dan realisasi maka bisa dilakukan evaluasi sumber masukan dana bagaimana keterkaitannya dengan keluaran dan hasil untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk anggaran.

Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo(2009) siklus untuk anggaran berbasis kinerja empat tahap yang meliputi tahap yang terdiri dari (1) persiapan; (2) ratifikasi; (3) Tahap implementasi; dan (4) melaporan evaluasi. Untuk bisa menyusun anggaran berbasis kinerja lebih dulu di susun merencanakan strategi. Penyusunan strategi di lakukan dengan obyek melibatkan semua komponen yang berada di pemerintah serta masyarakat supaya sistem bisa berjalan sangat bagus perlu adanya beberapa hal yang menentukan ialah harga standart, tolok ukur dan standar pelayanan yang minimal sudah di tetapkan berdasarkan aturan undang-undang.

Efektifitas Pengendalian Kinerja

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidak organisasi untuk mencapai tujuan. Kalau organisasi sudah mencapai tujuan berarti organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektifitas pengendalian kinerja organisasi yang di gunakan secara efektif untuk mencapai misi dan rencana organisasi serta pelaporan keuangan yang handal dan serta kebijakan hukum dan peraturan yang relevan diikuti (Mahmudi : 2015).

Pengukuran efisiensi

Efisiensi di ukur dengan alat rasio antara input dengan output yang semakin besar dan output di banding dengan output maka makin tinggi efisiensi organisasi (Mardiasmo 2009). Ukuran untuk efisiensi mengukur sudah seberapa mampu dimiliki supaya bisa menghasilkan output (Mahmudi, 2007).

Pengukuran efektivitas

Ukuran suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Indikator efektifitas menggambarkan akibat jangkauan serta dampak output dalam mencapai program. Semakin output yang dihasilkan berperan semakin terhadap pencapaian untuk tujuan atau sasaran yang di tentukan maka semakin efektif.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian dalam pengamatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jenis sumber data primer dimana dalam penelitian ini menggunakan data kuisisioner yang diolah dengan SPSS. Sedangkan metode yang digunakan dalam penyatuan data adalah teknik kuisisioner yang di sebar untuk pemerintah desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, sebagai data yang diamati karena permasalahan yang diambil dalam penelitian hanya masalah yang dihadapi pemerintah desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Teknik analisis data dinyatakan dalam beberapa uji sebagai berikut : Uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya kuisisioner dan uji reabilitas untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji asumsi klasik dengan perhitungan: Uji normalitas, Uji multikolonieritas (dengan melihat hasil perhitungan VIF dan *tolerance*, dengan nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10), Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dan uji Autokorelasi.

Analisis regresi linier sederhana yang dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut : $Y = a + bX$. Menggunakan uji parsial (t) untuk melihat pengaruh secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas penganggaran berbasis kinerja

No	Item	r hitung	t tabel	Keterangan
1	1	0,432	0,30	Valid
2	2	0,585	0,30	Valid
3	3	0,474	0,30	Valid
4	4	0,334	0,30	Valid
5	5	0,375	0,30	Valid
6	6	0,498	0,30	Valid
7	7	0,562	0,30	Valid
8	8	0,323	0,30	Valid

9	9	0,383	0,30	Valid
10	10	0,563	0,30	Valid
11	11	0,425	0,30	Valid
12	12	0,378	0,30	Valid

Uji validitas efektivitas pengendalian kinerja

No	Item	r hitung	t tabel	Keterangan
1	1	0,635	0,30	Valid
2	2	0,584	0,30	Valid
3	3	0,655	0,30	Valid
4	4	0,352	0,30	Valid
5	5	0,353	0,30	Valid
6	6	0,404	0,30	Valid
7	7	0,306	0,30	Valid
8	8	0,485	0,30	Valid
9	9	0,371	0,30	Valid
10	10	0,386	0,30	Valid
11	11	0,478	0,30	Valid
12	12	0,414	0,30	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas variabel penganggaran berbasis kinerja (X) dan variabel Efektivitas pengendalian kinerja (Y) di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pertanyaan untuk masing masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig (tailed) pada kolom total untuk setiap pertanyaan/pertanyaan pada setiap variabel $< 0,05$ hal ini sesuai dengan kriterianya jika nilai sig (2tailed) $< 0,05$ maka pertanyaan/pertanyaan dinyatakan valid.

Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan/ Pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

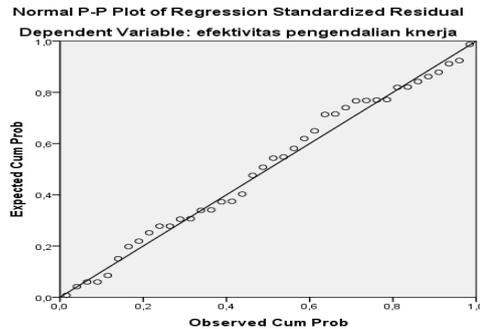
Uji Realibitas

Variabel	Koefisien α	Keterangan
Penganggaran berbasis kinerja	0,865 $> 0,600$	Reliebel
Evektivitas penegndalian kinerja	0,763 $> 0,600$	Reliebel

Berdasarkan dari hasil uji reabilitas diatas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliable karena menunjukkan tingkat reabilitas yang tinggi hal ini dibuktikan nilai koefisien alpha lebih dari 0,60

sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

Untuk normalitas adalah untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Didapat hasil sebagai berikut :

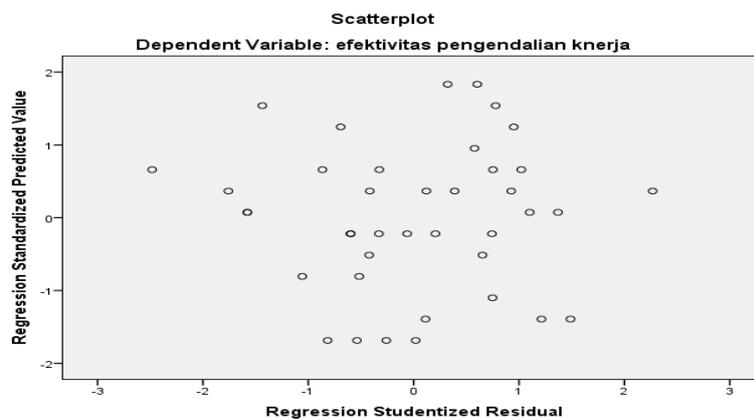


Dengan melihat grafik normal plot, kita dapat melihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

Dengan melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil multikolonieritas menerangkan bahwa hasil perhitungan *tolerance* masing-masing variabel independen adalah penganggaran berbasis kinerja 0,865. Dari seluruh perhitungan nilai *tolerance* memiliki nilai $> 0,10$ yang berarti tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas. Sedangkan nilai perhitungan VIF adalah penganggaran berbasis kinerja 1,678. Maka perhitungan nilai VIF memiliki nilai < 10 . Maka dapat dalam model regresi linier sederhana diatas tidak ditemukan adanya multikolonieritas.

Pengujian heteroskedastisitas adalah pengujian dimana mendeteksi ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Cara mendeteksinya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola *scatterplot*. Hasilnya



Berdasarkan diagram scatterplot diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik – titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedasitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} dari variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1) sebesar 9,273 dan t_{tabel} (sampel 40) sebesar 3,719 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Kemudian dari tingkat signifikan t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), secara parsial memang tingkat signifikansi variabel penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian kinerja lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hipotesis yang menyatakan menerima H_a menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1) secara parsial terhadap efektivitas pengendalian kinerja.

“Hasil Uji Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Efektivitas pengendalian Kinerja (Y)”. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Penganggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Efektivitas pengendalian kinerja sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 9,273 dengan nilai signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,660 menunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penendalian Kinerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Penganggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula Efektifitas pengendalian kinerjanya. Sehingga untuk meningkatkan pengendalian kinerja perlu dilakukan perencanaan anggaran yang baik karena perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmoko (2006) peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap efektifitas pengendalian yang meliputi efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja, Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, menunjukkan - bahwa variabel Penganggaran Berbasis Kinerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja, Berdasarkan dari hasil pengujian variabel Penganggaran Berbasis Kinerja tersebut berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja naik, maka terhadap fektivitas Pengendalian Kinerja instansi pemerintah juga naik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bastian (2006:54) yang menyatakan bahwa keterkaitan anggaran berbasis kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja bahwa upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dengan itu peneliti memberikan saran Bagi Pemerintah Desa Ngompro, dengan tingginya pengaruh penganggaran berbasis kinerja, maka di harapkan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang membawa pengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian kinerja. Beberapa cara yang dapat di lakukan antara lain dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* yang maksimal, melibatkan seluruh jajaran dalam proses perencanaan, menghasilkan program yang sesuai dengan visi dan misi organisasi, dan berusaha menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menambahkan variabel independen yang lain atau lebih bervariasi, sehingga peneliti di bidang pemerintahan lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagdja, M . 2006. *Penyusunan APBD Berbasis Kinerja* : Jurnal Goverance
- Bastian, I, 2006. *Akutansi Sektor Publik* . Jakarta : Penerbit Erlangga
- Dedi, N. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Febriana, A. 2016. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah daerah*, Studi Khusus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat : Jurnal Manajemen, Vol.15, No 02 Mei 20016
- Halim, A dan Kusufi, M.2014. *Teori Konsep dan Aplikasi Akutansi Sektor Publik..* Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi



Syawie, F. 2016. *Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Epektifitas Pengendalian Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bitung*: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16, No 04 Tahun 2016

Veni, A. 2013. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah* : Jurnal